



**PENGARUH MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
LUAS PENGUNGKAPAN SUKARELA PADA LAPORAN TAHUNAN
PERUSAHAAN**

Disusun oleh :

ALFIZAH AZZAHRA

NIM. 165020307111020

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih

Derajat Sarjana Ekonomi



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG**

2020

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul:

**PENGARUH MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
LUAS PENGUNGKAPAN SUKARELA PADA LAPORAN TAHUNAN**

Yang disusun oleh:

Nama : Alfizah Azzahra
Nim : 165020307111020
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Akuntansi Manajemen

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Malang, 30 Juni 2020

Dosen Pembimbing

Dr. Erwin Saraswati, S.E., M.Acc., Ak., CPMA

NIP. 19600124 198601 2 001



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

“PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN SUKARELA PADA LAPORAN TAHUNAN”

Yang disusun oleh:

Nama : Alfizah Azzahra

NIM : 165020307111020

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal **15 Juli 2020** dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. Erwin Saraswati, Ak., CPMA., CSRS., CA.

NIP. 19600124 198601 2 001

(Dosen Pembimbing)

2. Prof. Dr. Sutrisno T., SE., Ak., M.Si.

NIP. 19560403 198503 1 003

(Dosen Penguji I)

3. Dr. Sari Atmini, M.Si., Ak.

NIP. 19720611 199702 2 001

(Dosen Penguji II)

Malang, 15 Juli 2020

Ketua Program Studi S1 Akuntansi,



Dr. Dra. Endang Mardiaty, M.Si., Ak.

NIP. 19590902 198601 2 001



SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Alfizah Azzahra
NIM : 165020307111020
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul :

PENGARUH MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN SUKARELA PADA LAPORAN TAHUNAN

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Malang, 30-06-2020

Pembuat Pernyataan,



Alfizah Azzahra

NIM. 165020307111020

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Alfizah Azzahra
Nim : 165020307111020
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi

Telah melaksanakan penelitian di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Brawijaya Malang dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

**PENGARUH MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
LUAS PENGUNGKAPAN SUKARELA PADA LAPORAN TAHUNAN**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya.

Malang, 30 Juni 2020

Dosen Pembimbing

Dr. Erwin Saraswati, S.E., M.Acc., Ak., CPMA

NIP. 19600124 198601 2 001



RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Alfizah Azzahra
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat / Tanggal Lahir : Malang, 26 Maret 1998
 Agama : Islam
 Status : Belum Menikah
 Alamat Rumah : Jalan Raya Karangsono no. 35, Sukorejo, Pasuruan
 Alamat E-mail : alfizahraa@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SDN Glagahsari 1	2004-2010
SMPN 1 Pandaan	2010-2013
SMAN 1 Pandaan	2013-2016
S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya	2016-2020

Pengalaman Organisasi dan Kepanitiaan

Staf Divisi Humas	
Get Ready To Be Wealthy	2017
Staf Divisi Acara	
Let's Speak	2017



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Akuntansi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari adanya kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Nurkholis, SE., M.Bus. (Acc.), Ak., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

2. Bapak Dr. Drs. Roekhudin, M.Si., Ak. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

3. Ibu Dr. Erwin Saraswati, SE., M. Acc., Ak., CPMA., CSRS., CA. Selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, ide, ilmu, serta pemikiran yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.



4. Bapak Prof. Dr. Sutrisno T., SE., M.Si., Ak. Selaku Dosen Penguji Satu yang sudah membantu penulis dalam memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi.

5. Ibu Dr. Sari Atmini, M.Si., Ak. Selaku Dosen Penguji Dua yang sudah membantu penulis dalam memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi.

6. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendoakan serta memberikan dukungan baik secara moril maupun materil yang tidak dapat tergantikan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

7. Sahabat terdekat penulis, Aksiomawati, Amelinda Utomo dan Jihan Putri Rosyidah yang telah menemani selama delapan semester dalam suka maupun duka, memberikan dukungan dan segala bentuk bantuan untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan sarjana.

8. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang sangat membantu dalam setiap penulisan dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa terdapat ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Malang, Juli 2020

Alfizah Azzahra



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kontribusi Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Teori agensi.....	8
2.1.2 Teori Sinyal.....	9
2.2 Pengungkapan.....	11
2.2.1 Konsep Pengungkapan.....	11
2.2.2 Pedoman Pengungkapan.....	12
2.2.3 Jenis Pengungkapan.....	12
2.3 <i>Corporate Governance</i>	13
2.3.1 Pengertian <i>Corporate Governance</i>	13
2.3.2 Prinsip <i>Corporate Governance</i>	14
2.3.3 Mekanisme <i>Corporate Governance</i>	16
2.4 Penelitian Terdahulu.....	21
2.5 Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis.....	22



2.5.1 Kerangka Pemikiran22

2.5.2 Pengembangan Hipotesis24

BAB III METODE PENELITIAN28

3.2 Data Penelitian dan Sumbernya.....29

3.2.1 Jenis dan Sumber Data29

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data30

3.3 Variabel Penelitian.....31

3.3.1 Variabel Independen.....31

3.3.2 Variabel Dependen33

3.3.3 Variabel Kontrol34

3.4 Teknik Analisis Data35

3.4.1 Statistik Deskriptif.....35

3.4.2 Uji Asumsi Klasik35

3.4.3 Analisis Regresi Berganda38

3.4.4 Pengujian Hipotesis39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN41

4.1 Hasil Penelitian41

4.1.1 Sampel Penelitian41

4.1.2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian42

4.1.3 Hasil Pengujian Asumsi Klasik45

4.1.4 Analisis Regresi Linear Berganda49

4.2 Pengujian Hipotesis51

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian55

4.3.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan
Sukarela55

4.3.2 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Sukarela56

4.3.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan
Sukarela57

4.3.4 Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Pengungkapan



Sukarela.....	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Keterbatasan dan Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
DAFTAR LAMPIRAN.....	67



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perhitungan Sampel Penelitian	41
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	43
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas Data	45
Tabel 4.4 Hasil Uji Asumsi Multikolinearitas	46
Tabel 4.5 Hasil Pengujian Autokorelasi	48
Tabel 4.6 Perbandingan Pengujian Asumsi Non – Autokorelasi	48
Tabel 4.7 Analisis Regresi Linear Berganda	49
Tabel 4.8 Hasil Uji Hipotesis F	51
Tabel 4.9 Uji Koefisien Determinasi	52
Tabel 4.10 Uji T	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	23
Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas <i>Scatterplot</i>	47



ABSTRAK

PENGARUH MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN SUKARELA PADA LAPORAN TAHUNAN

PERUSAHAAN

Oleh:

Alfifah Azzahra

Dosen Pembimbing: **Dr. Erwin Saraswati, SE., M. Acc., Ak., CPMA., CA.**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap luas pengungkapan sukarela pada laporan tahunan perusahaan. Unsur-unsur mekanisme *corporate governance* diproksikan dalam ukuran dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga sebagai variabel independen, sedangkan pengungkapan sukarela digunakan sebagai variabel dependen yang diukur dengan menggunakan indeks pengungkapan sukarela. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan dan ukuran KAP digunakan sebagai variabel kontrol. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan tahunan perusahaan manufaktur sektor aneka barang konsumsi periode 2016 - 2018 yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Sebanyak 27 perusahaan sektor aneka barang konsumsi digunakan sebagai sampel penelitian dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, komisaris independen dan kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Sebaliknya, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Hal tersebut dikarenakan pihak institusional hanya berfokus pada hasil yang disajikan dalam laporan keuangan, sehingga kurang memperhatikan pengungkapan informasi tambahan secara sukarela yang disajikan pada laporan tahunan perusahaan.

Kata kunci: pengungkapan sukarela, corporate governance, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan keluarga



ABSTRACT

THE EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE MECHANISM ON VOLUNTARY DISCLOSURE IN COMPANIES' ANNUAL REPORT

By:

Alfizah Azzahra

Supervisor: **Dr. Erwin Saraswati, SE., M. Acc. Ak., CPMA., CA.**

This research aims to examine the effect of corporate governance mechanism on voluntary disclosure in companies' annual report. The size of the board commissioners, independent board of commissioners, institutional ownership and family ownership are the independent variables used as the proxy of corporate governance mechanism measures; the voluntary disclosure is the dependent variable measured utilizing items of disclosure index; and the company size and public accounting firm size are the control variables. This research uses secondary data from the annual report of consumer goods companies listed on Indonesia Stock Exchange between 2016 and 2018. The samples consist of 27 companies selected by purposive sampling method. The multiple linear regression analysis result indicates that the size of the board commissioners, independent board of commissioner, and family ownership have an effect on voluntary disclosure, while institutional ownership has no effect on voluntary disclosure. As the institutions focuses on the output of financial statement, additional information on voluntary disclosure lacks attention.

Keywords: voluntary disclosure, corporate governance, size of the board comissioners, independent board of comissioners, institutional ownership, family ownership



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya kegiatan investasi di Indonesia, menuntut kepada perusahaan-perusahaan yang telah *go public* untuk menyajikan informasi secara transparan dan terbuka kepada para investor guna mengambil keputusan investasi. Kualitas informasi dan seberapa luas pengungkapan yang disajikan oleh perusahaan dapat dilihat melalui laporan tahunan (Angganil, 2016).

Laporan tahunan (*annual report*) memberikan gambaran mengenai kinerja perusahaan berupa informasi finansial dan informasi non finansial yang telah dicapai oleh perusahaan. Perusahaan menggunakan laporan tahunan untuk mengungkapkan informasi kepada para pemangku kepentingan dalam membuat keputusan ekonomi yang lebih baik (Al Shammari, 2013). Dalam mengambil keputusan berinvestasi, investor mengandalkan pengungkapan informasi yang tersedia dalam laporan tahunan untuk menganalisis kinerja perusahaan, serta batasan informasi yang diperoleh tergantung pada luas pengungkapan informasi tersebut (Sehar, 2013).

Menurut Poulan dan Nugroho (2015) dalam praktik informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan oleh perusahaan dikategorikan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-431/BL/2012 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu Peraturan Nomor



29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan sesuai standar akuntansi yang berlaku kepada perusahaan *go public* secara jelas dan lengkap.

Jenis pengungkapan yang kedua yaitu pengungkapan sukarela, merupakan pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan selain dari kewajiban yang telah dipersyaratkan oleh badan pengawas atau standar akuntansi yang berlaku umum.

Perusahaan bebas untuk memilih dalam memberikan informasi sukarela yang relevan kepada para pemangku kepentingan (Silaban, 2015).

Salah satu cara dalam meningkatkan kredibilitas perusahaan dan membantu investor dalam menyusun strategi bisnis adalah dengan menambah luas kelengkapan informasi sukarela dalam laporan tahunan (Hardiningsih, 2008). Seiring dengan kontribusi pengungkapan sukarela pada nilai ekuitas, likuiditas pasar, biaya modal dan secara keseluruhan untuk mengurangi masalah agensi antara manajer dan investor, permintaan akan pengungkapan sukarela juga meningkat (Akhtaruddin dan Haron, 2010).

Pengungkapan sukarela dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan yang melakukannya. Selain itu, dapat menambah keyakinan investor dan kreditor dalam menetapkan keputusan untuk berinvestasi. Risiko yang dimiliki oleh perusahaan dapat diketahui melalui adanya pengungkapan sukarela sehingga dapat memberi pengaruh untuk investor dalam menentukan keputusan investasi maupun keputusan kreditor dalam pemberian kredit (Yunita, 2012).

Transparansi dan pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan menggambarkan salah satu pilar dari *corporate governance* (Shehata, 2014).



Allegrini dan Greco (2013) menyatakan bahwa *corporate governance* bermanfaat sebagai mekanisme kontrol untuk mengurangi adanya konflik agensi, yaitu perilaku oportunistik dari pihak manajemen dan adanya asimetri informasi.

Corporate governance merupakan sistem yang mengatur dan mengontrol perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan, karena *corporate governance* yang baik dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan dan professional. Penerapan prinsip-prinsip *corporate governance* secara konsisten pada perusahaan akan menarik minat para investor (Effendi, 2009)

Menurut Foo dan Zain (2010) Perusahaan dengan *corporate governance* dapat menyediakan informasi secara sukarela selain dari yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku. *Corporate governance* yang baik dapat dijadikan alat penggerak serta mendukung dalam meningkatkan kualitas informasi yang bersifat sukarela.

Peran manajemen sangat penting dalam memenuhi kepentingan para pemegang saham dan calon investor melalui pengungkapan sukarela. Hal tersebut dikarenakan saat akuntan perusahaan mengungkapkan informasi yang bersifat sukarela dalam laporan tahunan perusahaan, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan manajemen puncak. Apabila suatu perusahaan memiliki sistem mekanisme *corporate governance* yang baik, maka dapat meningkatkan kualitas pengungkapan sukarela perusahaan menjadi lebih baik (Rafifah dan Ratmono, 2015).

Secara empiris, penelitian mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan sukarela sudah dilakukan di dalam maupun di luar negeri,



penelitian-penelitian tersebut juga memiliki hasil yang beragam. Silaban (2015) menyebut bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan sukarela, sedangkan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.

Hasil penelitian Chau dan Gray (2010) menunjukkan bahwa perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan keluarga yang besar memiliki lebih sedikit tingkat pengungkapan sukarela, hal tersebut dikarenakan investor utama dalam perusahaan bukan dari pihak eksternal, melainkan dari internal perusahaan itu sendiri. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan, sedangkan ukuran dewan komisaris dan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan (Poulan dan Nugroho, 2015). Hasil penelitian yang berbeda diungkapkan oleh Rafifah dan Ratmono (2015) yang menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji keterkaitan antara *corporate governance* dan pengungkapan sukarela pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, khususnya perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur sektor aneka barang konsumsi. Mekanisme *corporate governance* dalam penelitian yang akan dilakukan penulis ini diprosikan dengan struktur ukuran dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga dengan menyesuaikan *disclosure index* yang dibuat oleh Keputusan Ketua Bapepeam No.Kep-431/BL/2012



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah mekanisme *corporate governance* dengan proksi ukuran dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh mekanisme *corporate governance* dengan proksi ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan sukarela.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh mekanisme *corporate governance* dengan proksi komisaris independen terhadap pengungkapan sukarela.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh mekanisme *corporate governance* dengan proksi kepemilikan institusional terhadap pengungkapan sukarela.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh mekanisme *corporate governance* dengan proksi kepemilikan keluarga terhadap pengungkapan sukarela.

1.4 Kontribusi Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis, praktik, serta kebijakan. Kontribusi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis



Penelitian ini dapat menambah referensi dan wawasan para akademisi dalam memahami teori akuntansi yang terkait dengan mekanisme *Corporate Governance* dan Pengungkapan Sukarela melalui teori agensi dan teori sinyal.

2. Kontribusi Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian dapat memberikan wawasan akan pentingnya mekanisme *Corporate Governance* dan Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan untuk menarik investor agar berinvestasi pada perusahaan tersebut.

b. Bagi Investor

Penelitian dapat memberikan wawasan kepada investor untuk menerima kelengkapan informasi yang mereka terima serta membantu dalam mengambil keputusan investasi.

3. Kontribusi Kebijakan

Penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh regulator dalam penerapan peraturan mengenai pengungkapan informasi bersifat sukarela pada laporan tahunan perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, sebagai berikut.

1. BAB I : PENDAHULUAN



Bab ini menjelaskan mengenai ringkasan secara keseluruhan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat mengenai referensi dan sumber-sumber yang berkaitan dengan topik pada penelitian skripsi.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan bagaimana metode yang akan digunakan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data dalam menjawab rumusan masalah

4. BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengungkapkan bagaimana penjelasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

5. BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan seluruh pembahasan, keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori merupakan pembahasan teori dasar yang dilakukan oleh peneliti untuk langkah penyelesaian masalah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori agensi dan teori sinyal.

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi adalah sebuah teori yang muncul untuk mengidentifikasi hubungan antara satu orang atau lebih pemegang saham sebagai prinsipal dan pihak manajemen sebagai agen (Karajeh, 2017). Menurut Jensen dan Meckling (1976) konflik agensi muncul karena adanya hubungan kontraktual antara agen dan prinsipal dimana prinsipal memberikan wewenang kepada agen dalam pengambilan keputusan dan agen bertindak untuk mengelola kegiatan bisnis atas nama prinsipal.

Menurut Godfrey (2010) kedua pihak baik pemegang saham maupun manajemen akan terlebih dahulu memprioritaskan kepentingan pribadi dalam atau disebut sebagai *utility maximizer*. Godfrey (2010) menjelaskan bahwa masalah agensi dapat timbul karena pihak manajemen tidak menanggung risiko atas kerugian pemegang saham dalam pengambilan keputusan. Adanya konflik kepentingan tersebut memicu pemegang saham untuk memantau dan mengawasi setiap keputusan yang dibuat oleh manajer. Salah satu cara untuk mengatasi



konflik agensi tersebut adalah dengan melakukan tata kelola perusahaan (*corporate governance*)

Teori agensi mendorong munculnya konsep tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Dalam rangka memberikan jaminan kepada pemegang saham bahwa akan menerima *return* dari dana yang telah diinvestasikan, *corporate governance* dapat digunakan sebagai alat untuk meyakinkan para pemegang saham tersebut (Hamdani, 2016). *Corporate governance* difungsikan sebagai cara agar para pemegang saham yakin bahwa manajer akan mengelola bisnis dengan baik sehingga dapat memberikan keuntungan dan meminimalisir adanya penggelapan dari kegiatan bisnis atau menginvestasikan modal yang ditanam oleh investor ke dalam proyek yang tidak menguntungkan (Hadiprajitno, 2014) .

Corporate governance dapat digunakan untuk mengawasi kinerja agen sesuai dengan kepentingan perusahaan, fungsi, dan tanggung jawab. Manajemen yang memiliki akses lebih baik terhadap informasi internal perusahaan dapat meminimalkan adanya asimetri informasi melalui pengungkapan secara sukarela, sehingga publik dapat mengetahui gambaran kondisi perusahaan secara transparan.

2.1.2 Teori Sinyal

Teori sinyal muncul dalam ilmu ekonomi dan keuangan untuk memperhitungkan fakta bahwa orang yang terlibat dalam kegiatan internal perusahaan secara umum memiliki informasi yang lebih baik mengenai kondisi



kinerja perusahaan apabila dibandingkan dengan pihak eksternal seperti contohnya adalah investor. Hal tersebut menimbulkan asimetri informasi yang mana menyebabkan investor sulit untuk mengetahui dan menilai secara objektif bagaimana kondisi dan kinerja perusahaan (Arifin, 2007).

Teori sinyal menyebutkan bahwa penggunaan laporan keuangan oleh perusahaan adalah untuk memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan baik berupa sinyal positif maupun negatif. Pengungkapan laporan keuangan oleh perusahaan adalah salah satu cara untuk memberikan isyarat pada para pemangku kepentingan berupa informasi untuk menunjukkan kinerja perusahaan.

Penyampaian sinyal kepada para pemangku kepentingan dapat dilakukan dengan melalui pengungkapan laporan tahunan dengan mencakup informasi-informasi yang dibutuhkan baik informasi keuangan maupun non keuangan (Ardani, 2015).

Dalam konsep teori sinyal dijelaskan bahwa perusahaan didorong untuk memberikan informasi dikarenakan terdapat asimetri informasi antara manajer perusahaan dengan pihak eksternal. Dengan adanya pengungkapan informasi secara sukarela dalam laporan tahunan, manajemen perusahaan dapat memberikan sinyal positif bahwa perusahaan secara rinci dapat memberikan informasi yang tidak terdapat pada laporan keuangan. Informasi-informasi bersinyal positif dapat memberikan gambaran kepada stakeholders mengenai kinerja perusahaan apakah telah berjalan sesuai dengan keinginan stakeholders atau tidak. Selain itu, informasi bersinyal positif dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya asimetri informasi (Damayanti dan Priyadi, 2016).



2.2 Pengungkapan

2.2.1 Konsep Pengungkapan

Menurut Hendriksen (2002), secara umum konsep pengungkapan terbagi menjadi tiga, yaitu:

a. *Adequate disclosure* (pengungkapan cukup)

Adequate disclosure merupakan pengungkapan minimum yang disajikan sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana pihak-pihak yang berkepentingan dapat menginterpretasikan informasi dan angka-angka yang disajikan dalam laporan tahunan.

b. *Fair disclosure* (pengungkapan wajar)

Fair disclosure merupakan pengungkapan yang dilakukan perusahaan dengan memberikan informasi yang layak kepada seluruh pemakai laporan keuangan.

c. *Full disclosure* (pengungkapan penuh)

Full disclosure merupakan pengungkapan yang menyajikan seluruh informasi penting yang mempengaruhi penilaian para pemakai laporan dalam pengambilan keputusan.

Di Indonesia, pengungkapan wajar (*fair disclosure*) merupakan konsep yang digunakan dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (Martani, 2018).



2.2.2 Pedoman Pengungkapan

Di Indonesia, pedoman pengungkapan diatur dalam Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keuangan (Bapepam-LK) No. 06/PM/2000 tentang pedoman penyajian laporan keuangan. Peraturan ini dibuat dengan mewajibkan emiten dan perusahaan publik dalam menyajikan laporan keuangan yang disusun dengan berdasarkan standar akuntansi yang sedang berlaku dalam rangka memenuhi prinsip keterbukaan untuk menciptakan *good corporate governance*.

ECD Principles of Corporate Governance yang kelima juga mengatur mengenai pedoman pengungkapan dan transparansi. Pada prinsip yang kelima ini, tata kelola perusahaan harus menyajikan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat dalam seluruh aspek material yang mencakup kondisi keuangan, kepemilikan, kinerja dan tata kelola yang terdapat pada perusahaan.

2.2.3 Jenis Pengungkapan

Pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan terdiri atas dua jenis (Wardani, 2012), yaitu:

1. *Mandatory Disclosure* (Pengungkapan Wajib)

Pengungkapan wajib adalah pengungkapan dalam laporan tahunan yang diwajibkan dan disesuaikan dengan standar akuntansi yang relevan serta diatur oleh badan pengawas pasar modal di negara yang bersangkutan.



2. *Voluntary Disclosure* (Pengungkapan Sukarela)

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang berisi informasi-informasi tambahan diluar pengungkapan wajib yang bersifat secara sukarela. Pengungkapan sukarela tidak diatur oleh standar akuntansi dan badan pengawas yang berwenang.

Pengungkapan sukarela merupakan pilihan yang secara bebas dapat dipilih manajemen perusahaan dalam memberikan informasi yang relevan pada laporan tahunan perusahaan untuk pengambilan keputusan ekonomi oleh para pengguna laporan (Shehata, 2014).

Pengungkapan sukarela dapat membantu investor dalam memahami kinerja operasional perusahaan dan secara transparan dapat menunjukkan kondisi perusahaan yang sebenarnya terhadap *stakeholders* atau pengguna laporan keuangan. Informasi yang terdapat pada laporan sukarela tersebut dapat mengurangi terjadinya asimetri informasi antara pihak manajemen perusahaan dan pihak eksternal (addiyah, 2014).

2.3 *Corporate Governance*

2.3.1 *Pengertian Corporate Governance*

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP117/M-MBU/2002 corporate governance adalah “struktur yang digunakan organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang denga tetap



memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berdasarkan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.”

Corporate governance adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan yang didalamnya terdapat seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Berbagai macam atribut *corporate governance* dapat digunakan untuk mengendalikan kemungkinan terjadinya konflik agensi dengan memastikan bahwa manajemen perusahaan sebagai agen telah bertindak sesuai dengan kepentingan para prinsipal yaitu para pemegang saham. Penerapan *corporate governance* pada perusahaan dapat menjadi salah satu kriteria bahwa perusahaan tersebut dikatakan baik (Agoes, 2013)

2.3.2 Prinsip *Corporate Governance*

Perusahaan harus memastikan bahwa prinsip *corporate governance* yang baik diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Prinsip *corporate governance* diperlukan untuk mencapai keberlanjutan usaha perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (KNKG, 2006).

1. *Accountability* (Akuntabilitas)

Perusahaan harus mampu bertanggung jawab atas kinerjanya secara transparan dan wajar. Pengelolaan perusahaan harus dilakukan secara efektif dan terukur sesuai dengan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban



struktur dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

2. *Transparency* (Transparansi)

Perusahaan harus menyediakan informasi material dan relevan yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan, hal tersebut dilakukan dalam upaya menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis. Perusahaan mampu untuk berinisiatif dalam mengungkapkan informasi tidak hanya yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan namun juga hal yang penting untuk pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan keputusan.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban).

Dalam mengelola usahanya, perusahaan harus mematuhi prinsip-prinsip korporasi dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat menjaga keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

4. *Independency* (Independensi)

Dalam upaya menghindari terjadinya benturan kepentingan antar organ dan intervensi dari pihak lain, perusahaan harus mampu mengelola usahanya secara profesional dengan menjaga independensinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan supaya masing-masing organ



perusahaan tidak mempengaruhi satu sama lain serta tidak ada terjadinya kegiatan saling lempar tanggung jawab untuk terciptanya pengendalian secara efektif.

5. Fairness (Kewajaran dan Kesetaraan)

Perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan kegiatan usahanya dengan berdasarkan prinsip kewajaran dan kesetaraan. Kesetaraan dan kewajaran harus ditekankan dalam pengelolaan perusahaan terutama untuk memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul dari adanya perjanjian maupun peraturan yang berlaku.

2.3.3 Mekanisme *Corporate Governance*

Pengertian mekanisme *corporate governance* adalah suatu pola hubungan, sistem, dan proses didasari oleh peraturan perundangan yang berlaku yang digunakan oleh organ perusahaan dalam rangka memberikan nilai tambah kepada pemegang saham dalam jangka panjang secara berkesinambungan. Mekanisme tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan dan perundangan dan norma yang berlaku (Daniri, 2005).

Sistem pengawasan *board* dalam *corporate governance* dibagi menjadi dua jenis yaitu *one tier system* dan *two tier system*. *One tier system* adalah jenis sistem dimana perusahaan hanya memiliki satu dewan direksi, secara umum tugas dewan direksi tersebut merangkap tugas dengan prinsip waktu sebagai manajer atau direktur eksekutif dan direktur independen. Undang – undang nomor 40 tentang perseroan terbatas mengharuskan setiap perusahaan di Indonesia menggunakan jenis *two tier system* dimana mekanisme dalam pengawasan terbagi menjadi dua



yaitu dewan direksi yang bertugas dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan dan dewan komisaris yang melaksanakan tugas dalam fungsi pengawasan di dalam perusahaan secara keseluruhan. Pengawasan dari dalam perusahaan dilakukan oleh dewan komisaris yang juga berperan sebagai perwakilan para pemegang saham dalam memastikan tercapainya tujuan yang diharapkan oleh pemegang saham (Hermawan, 2009)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan empat proksi *corporate governance* yaitu Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Keluarga

a. Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris ditunjuk melalui Rapat Umum Pemegang Saham secara transparan dengan fungsi untuk mengawasi kegiatan operasional perusahaan dan mengawasi kebijakan yang diambil oleh dewan direksi (Undang-Undang no. 40 tahun 2007). Dewan komisaris adalah organ perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan memberikan saran kepada dewan direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance* (KNKG, 2006).

Menurut Effendi (2009) dewan komisaris mempunyai wewenang dalam memperkerjakan dan memberikan kompensasi kepada para manajer tingkat, atau mengawasi keputusan kepentingan. Apabila dewan komisaris melakukan kesalahan maka hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Dalam menentukan keberhasilan penerapan *good corporate governance*, direksi dan



dewan komisaris perlu berkomitmen penuh agar penerapan *corporate governance* tersebut berjalan lancar.

Berdasarkan POJK No 33/POJK.04/2014 pasal 20 tentang keanggotaan menyebutkan bahwa:

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) diantaranya adalah Komisaris Independen.
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang tiga puluh persen dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. Satu diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris.

b. Komisaris Independen

Berdasarkan peraturan No 33 / POJK 2014 menyebutkan bahwa dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Dengan keberadaan dewan komisaris independen diharapkan agar mekanisme pengawasan dalam perusahaan dapat berjalan secara efektif (Nugrahani dan Nugroho, 2010)



Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terikat dengan direksi, anggota dewan komisaris lain dan pemegang saham, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi independensinya dalam bertindak atau bertindak hanya sesuai dengan fungsinya dan kepentingan perseroan (Undang-Undang Perseroan Terbatas ayat 12(2) no 40 tahun 2007).

Komisaris independen bertugas untuk mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh manajemen dan bertanggung jawab dalam menentukan apakah manajemen telah melaksanakan tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan melakukan pengendalian internal perusahaan, dikarenakan apabila pengawasan independen lemah dan kekuasaan eksekutif terlalu besar maka akan menjadi salah satu penyebab mundurnya kinerja perusahaan (Effendi, 2009)

c. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga lain, seperti perusahaan asuransi, perusahaan reksadana, perusahaan investasi, perusahaan dana pensiun. Kepemilikan institusional yang tinggi akan memunculkan usaha dalam pengawasan pengelolaan perusahaan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat mengurangi atau menghindari terjadinya perilaku oportunistik oleh manajemen (Awan, 2015)



Rafifah (2014) menyebutkan bahwa dengan adanya kepemilikan oleh institusi maka akan mendorong pengawasan yang lebih efektif dan efisien terhadap kinerja perusahaan. Institusi keuangan mampu untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja manajer agar tidak menyimpang sehingga manajer ditekan untuk bekerja sesuai dengan kepentingan para pemegang saham sehingga perusahaan mendapatkan citra yang baik di mata publik

d. Kepemilikan Keluarga

Perusahaan keluarga adalah perusahaan yang memiliki anggota keluarga dengan beberapa kepemilikan yang dapat diidentifikasi dari kepemilikan anggota keluarga perusahaan dan beberapa generasi dalam posisi kepemimpinan dalam perusahaan (Achmad, 2007). Faktor lain perusahaan dapat dikatakan memiliki pengendalian keluarga yaitu jika pemilik atau anggota dari keluarga tersebut berasal dari hubungan darah atau pernikahan berperan sebagai *officer, director*, atau *blockholder*, baik secara individual maupun group serta *CEO* atau ketua dewan direksi berasal dari anggota keluarga.

Menurut Villalonga dan Amit (2012) perusahaan keluarga memiliki peranan yang penting dalam menjaga stabilitas ekonomi baik lokal maupun regional secara permanen. Hal tersebut dikarenakan pemilik ingin menjaga kelangsungan hidup dari perusahaan agar dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya sehingga keuangan perusahaan dengan kepemilikan keluarga memiliki fokus keuangan jangka panjang dan mempunyai kontrol yang ketat dari prinsipal atas agen.



2.4 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan sukarela. Akhtarudin (2010) memiliki hasil penelitian tentang pengaruh kepemilikan keluarga, terhadap Voluntary Disclosure di Malaysia dengan sampel 105 perusahaan yang terdaftar di *Malaysian Stock Exchange*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris dan komisaris independen berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela. Sedangkan kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela.

Silaban (2015) melakukan penelitian dengan sampel seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2009-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan sukarela, sedangkan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.

Rafifah dan Ratmono (2015) melakukan penelitian dengan mengambil sampel seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun buku 2010-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.

Poulan dan Nugroho (2015) melakukan penelitian dengan tujuan untuk menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel



141 perusahaan manufaktur sektor aneka industri dan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Sedangkan komisaris independen dan ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.

2.5 Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

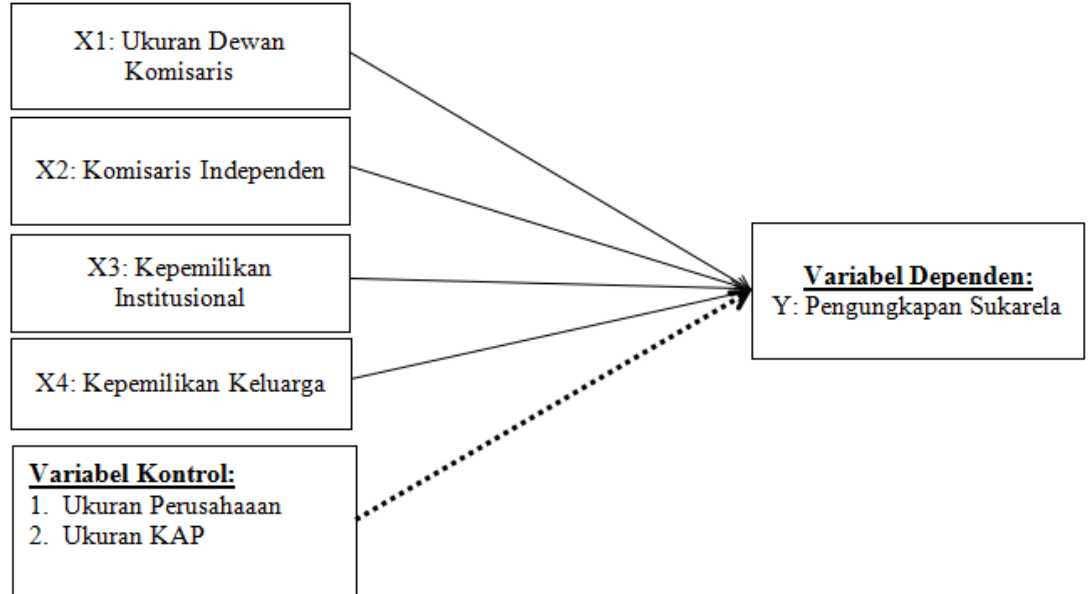
2.5.1 Kerangka Pemikiran

Teori agensi dan teori sinyal adalah teori yang melandasi pengungkapan sukarela. Dalam penelitian yang dilakukan Ball (2008) tentang pengaruh pengungkapan konflik agensi antara agen dan prinsipal, memiliki hasil bahwa peningkatan pengungkapan dan transparansi memiliki pengaruh positif terhadap konflik kepentingan yang terjadi antara agen dan prinsipal dikarenakan kesenjangan informasi antar kedua pihak tersebut dapat diminimalisir. Perusahaan dengan tata kelola yang baik akan menyediakan tambahan informasi secara sukarela dengan menyajikan informasi selain yang sudah dipersyaratkan oleh standar yang berlaku (Foo, 2010).

Penelitian ini akan menggunakan variabel ukuran dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga sebagai variabel independen serta variabel pengungkapan sukarela sebagai variabel dependen sedangkan ukuran perusahaan dan KAP menjadi variabel kontrol.



Variabel Independen



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.5.2 Pengembangan Hipotesis

2.6.2.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan

Sukarela

Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* sehingga memiliki peran penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *good corporate governance*. Tugas utama dewan komisaris adalah bertanggung jawab dan berwenang dalam mengawasi kebijakan dan kinerja manajemen (Effendi, 2009).

Apabila ukuran dewan komisaris dalam suatu perusahaan memiliki jumlah yang besar, maka perusahaan akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan (Rafifah dan Ratmono, 2015). Ukuran dewan komisaris yang besar juga akan meningkatkan pengawasan terhadap manajemen sehingga dapat mendorong manajemen untuk mengungkapkan informasi secara transparan (Poulan dan Nugroho, 2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Poulan dan Nugroho (2015) serta diperkuat dengan penelitian Avininda (2018) membuktikan pernyataan tersebut dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.

Berdasarkan literatur yang sudah dijelaskan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:



H1: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela

2.6.2.2 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Sukarela

Komisaris independen adalah komisaris yang bukan berasal dari pihak terafiliasi dengan pemegang saham, anggota keluarga direksi dan komisaris serta perusahaan itu sendiri yang mampu mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak untuk kepentingan perusahaan. Keberadaan komisaris independen dimaksudkan agar keputusan perusahaan dapat diambil secara efektif, tepat dan independen (Nugrahani, 2010)

Gantyowati (2014) menjelaskan bahwa dengan adanya komisaris independen maka manajemen akan terdesak untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas secara transparan. Untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi antara manajemen dan pihak perusahaan, komisaris independen mampu untuk meningkatkan transparansi perusahaan salah satunya dengan melaksanakan pengungkapan sukarela (Immanuel, 2015).

Hal tersebut dibuktikan dari hasil temuan yang didapatkan oleh Al Janadi (2013) serta Poulan dan Nugroho (2015), hasil penelitian mengungkapkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Berdasarkan literatur yang dijelaskan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H2: Komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela



2.6.2.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Sukarela

Soesatyo (2008) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh perusahaan atau lembaga lain. Institusi atau lembaga yang dimaksud dapat berupa perusahaan reksadan, perusahaan investasi, atau perusahaan dana pensiun.

Kepemilikan institusional menyebabkan adanya dorongan untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif. Kepemilikan dengan proporsi saham yang lebih besar oleh pihak institusi akan menekan manajemen perusahaan untuk melakukan pengungkapan laporan tahunan secara lebih luas dan transparan, termasuk didalamnya adalah laporan sukarela (Rafifah dan Ratmono, 2015).

Silaban (2015) dan Uyar (2014) membuktikan pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan sukarela dengan hasil yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela.. Berdasarkan literatur yang dijelaskan di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H3: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela

2.6.2.4 Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Pengungkapan Sukarela

Menurut Anderson (2005), perusahaan dengan kepemilikan yang terkonsentrasi pada keluarga memiliki permasalahan agensi yang berbeda dengan perusahaan dengan kepemilikan non-keluarga. Konflik agensi yang mendominasi



pada sistem kepemilikan ini adalah konflik antara pemegang saham keluarga dan pihak manajemen sebagai pengelola dengan pihak pemegang saham minoritas.

Perusahaan yang dengan kepemilikan oleh keluarga memiliki dorongan yang rendah dalam melakukan pengungkapan informasi selain yang telah disyaratkan oleh peraturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan permintaan akan pengungkapan terhadap publik relatif lebih lemah dari pengungkapan yang diharapkan dari perusahaan non-keluarga (Gray, 2002)

Sesuai dengan konsep teori agensi, perusahaan dengan kepemilikan yang terkonsentrasi seperti perusahaan keluarga mempunyai tingkat pengungkapan yang rendah. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan Akhtaruddin (2009) dan Darmadi (2013), hasil penelitian menunjukkan perusahaan dengan kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela.

Berdasarkan literatur yang dijelaskan di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H4: Kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan penelitian dengan data yang dikumpulkan berupa angka-angka dan diolah menggunakan teknik statistik (Yusuf, 2017). Variabel dependen yang digunakan adalah pengungkapan sukarela (Y1) pada laporan tahunan, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah unsur-unsur *corporate governance* yang terdiri dari Ukuran Dewan Komisaris (X1), Komisaris Independen (X2), Kepemilikan Institusional (X3) dan Kepemilikan Keluarga (X4). Variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan dan ukuran KAP. Penelitian kuantitatif dengan format deskriptif bertujuan untuk menjelaskan berbagai kondisi dan situasi yang terjadi, serta keterkaitan variabel yang menjadi objek penelitian (Bungin, 2005).

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur khususnya pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 sampai dengan tahun 2018. Alasan pemilihan perusahaan sektor barang konsumsi sebagai populasi dalam penelitian ini dikarenakan sektor tersebut hasil industrinya sebagian besar merupakan kebutuhan pokok sehari-hari yang selalu dibutuhkan masyarakat sebagai konsumen sehingga perusahaan manufaktur sektor aneka barang konsumsi mendapat perhatian lebih dari masyarakat luas, oleh karena itu pengungkapan



informasi secara sukarela yang dilakukan oleh perusahaan dapat berpengaruh terhadap keputusan para pengguna informasi dalam menilai kinerja perusahaan (Indriani, 2013).

Metode pengambilan sampel adalah purposive sampling yaitu pemilihan sampel secara tidak acak yang mempunyai tujuan atau kriteria tertentu. Adapun kriteria-kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.
2. Perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan secara lengkap sejak tahun 2016 sampai dengan 2018.
3. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang tidak *delisting* pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.
4. Tidak mengalami kerugian selama periode penelitian 2016 sampai dengan tahun 2018.

3.2 Data Penelitian dan Sumbernya

3.2.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada pengujian teori antar variabel serta datanya di ukur dalam suatu skala numerik (angka) dan melakukan analisis dengan statistik. (Kuncoro, 2009). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan tahunan



perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia khususnya pada tahun 2016-2018. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya, yang mengacu pada penelitian Poulan dan Nugroho (2015). Namun dalam penelitian ini, peneliti melakukan modifikasi terhadap subjek dan periode penelitian yang digunakan, serta melakukan modifikasi pada variabel independen.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu peneliti mengumpulkan data yang diperlukan melalui pengambilan data dari dokumen – dokumen yang sudah ada, seperti data yang dipublikasikan dalam laman resmi BEI pada www.idx.co.id dan laman resmi perusahaan-perusahaan terkait. Untuk menentukan perusahaan tersebut masuk dalam jenis perusahaan keluarga atau tidak, langkah yang dilakukan adalah (Sumarsono, 2014):

1. Mengidentifikasi nama keluarga pengendali dengan pencarian pengulangan nama yang ada pada nama pemegang saham, dewan direksi dan dewan komisaris pada laporan tahunan
2. Jika ada nama keluarga pengendali yang masih meragukan, nama tersebut dapat dilacak melalui *history of ownership* dalam prospektus perusahaan. Penulis juga memeriksa nama keluarga potensial melalui berbagai sumber di internet yang mungkin tidak didasarkan pada hubungan nama.



3.3 Variabel Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu mekanisme *corporate governance* yang diprosikan dari Ukuran Dewan Komisaris (X1), Komisaris

Independen (X2), Kepemilikan Institusional (X3), Kepemilikan Keluarga (X4).

Variabel dependen pada penelitian ini adalah pengungkapan sukarela (Y1), sedangkan variabel kontrol terdiri dari ukuran perusahaan dan ukuran KAP.

3.3.1 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain baik secara positif maupun negatif (Sekaran, 2014), pada penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah mekanisme *corporate governance* dengan proksi sebagai berikut.

1. Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Dalam penelitian ini ukuran dewan komisaris diukur dengan menggunakan indikator jumlah anggota dewan komisaris yang terdapat dalam suatu perusahaan sesuai dengan penelitian Poulan dan Nugroho (2015), yaitu:

$$\text{Ukuran Dewan Komisaris} = \text{Jumlah Dewan Komisaris}$$

2. Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan manajemen internal, anggota dewan komisaris lain dan



pemegang saham. Komisaris independen bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi independensinya (KNKG, 2006).

Indikator yang digunakan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Poulan dan Nugroho (2015), yaitu:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Seluruh Dewan Komisaris}}$$

3. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi lain seperti perusahaan bank, asuransi, dana pensiun. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan adalah presentase saham yang dimiliki institusi dari seluruh modal yang beredar, sesuai dengan penelitian yang dilakukan Gantyowati (2014), yaitu:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Kepemilikan Saham oleh Pihak Institusional}}{\text{Seluruh Saham Beredar}}$$

4. Kepemilikan Keluarga

Kepemilikan keluarga merupakan kepemilikan saham suatu perusahaan yang didominasi oleh keluarga dari pemilik perusahaan. Kepemilikan keluarga diukur dengan cara jumlah saham yang dimiliki oleh keluarga dibandingkan dengan seluruh saham yang beredar, yaitu:



Kepemilikan Saham oleh Pihak Keluarga

$$\text{Kepemilikan Keluarga} = \frac{\text{Kepemilikan Saham oleh Pihak Keluarga}}{\text{Seluruh Saham Beredar}}$$

3.3.2 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya, sehingga menjadi perhatian utama peneliti (Sekaran, 2014). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan sukarela pada laporan tahunan perusahaan. Penelitian ini menggunakan indeks pengungkapan sukarela berdasarkan penelitian yang dilakukan Juliarto (2016) dan disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK 04/2016. Penelitian ini diukur dengan variabel *dummy* yaitu akan diberikan nilai 1 untuk tiap item yang diungkapkan oleh perusahaan dan nilai 0 jika perusahaan tidak mengungkapkan item pengungkapan sukarela. dengan memberi checklist untuk setiap item sukarela yang diungkapkan oleh perusahaan.

Indeks pengungkapan masing-masing perusahaan akan dihitung dengan membagi jumlah item yang diungkapkan perusahaan dengan item yang ada dalam daftar item pengungkapan sukarela. Pengukuran indeks pengungkapan sukarela akan dilakukan sebagai berikut.

$$\text{IPS} = \frac{\sum Q}{\sum S}$$

Keterangan:

IPS : Indeks kelengkapan pengungkapan sukarela



Q : Item kelengkapan pengungkapan sukarela yang disajikan pada laporan tahunan

S : Semua item kelengkapan pengungkapan sukarela yang diharapkan terdapat pada instrumen

3.3.3 Variabel Kontrol

Sekaran (2014) menyebutkan bahwa variabel kontrol merupakan variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian hanya dibatasi oleh faktor dalam variabel kontrol yang diteliti. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua variabel yang terdiri dari:

1. Ukuran Perusahaan

Ukuran besar atau kecilnya perusahaan dapat dinilai melalui total aset yang dimiliki oleh perusahaan, indikator yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian Hidayat (2017).

$$\text{Ukuran perusahaan} = \ln(\text{Total Aset})$$

2. Ukuran Kantor Akuntan Publik

Ukuran KAP dalam penelitian ini merupakan besar kecilnya KAP yang dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu KAP yang berafiliasi dengan *Big-Four* dan KAP yang tidak berafiliasi dengan *Big-Four*. Variabel ukuran KAP diukur menggunakan variabel *dummy*. Apabila perusahaan tersebut diaudit oleh KAP *Big-*



Four maka diberikan nilai 1. Sebaliknya apabila perusahaan tersebut diaudit oleh KAP non *Big-Four*, maka diberikan nilai 0.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang dilakukan adalah analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka dan perhitungannya menggunakan metode statistik yang dibantu dengan program SPSS . Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan uji hipotesis

3.4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan variabel yang terdapat pada penelitian ini. Indikator yang digunakan adalah rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan minimum (Ghozali, 2011)

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda. Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah data telah memenuhi asumsi klasik yang ditetapkan dan untuk menghindari terjadinya pembiasan (Ghozali, 2011). Model tersebut harus memenuhi asumsi klasik yang digunakan yaitu: uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi, kemudian baru dilakukan uji hipotesis untuk menentukan ketepatan model.



1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011).

Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Metode yang digunakan untuk mendeteksi distribusi residual tersebut adalah analisis *Kolmogrov-Smirnov*. Dasar pengambilan keputusan dari uji *Kolmogrov-Smirnov* didasarkan pada perbandingan *significant level* ($\alpha = 5\%$ atau $\alpha = 0.05$), yaitu :

- 1) Data dinyatakan berdistribusi normal jika nilai signifikan $> 0,05$
- 2) Data dinyatakan tidak berdistribusi normal jika nilai signifikan $< 0,05$

2. Uji Multikolinieritas

(Ghozali, 2011). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel ini tidak ortogonal. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah melihat nilai dari *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen mana saja yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya.

Menurut Ghozali (2011) nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *Tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$.



3. Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2011) uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heterokedastisitas.

Dalam uji heterokedastisitas ini menggunakan *scatter plot* yang merupakan sebuah grafik yang diplot poin atau titik yang menunjukkan hubungan antara variabel dependen dengan residunya. Dasar membentuk pola tertentu atau teratur maka mengidentifikasi telah terjadi heterokedastisitas. Sebaliknya apabila titik-titik yang ada menyebar diatas dan dibawah angka 0 sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ($t-1$). Jika terjadi korelasi maka terdapat *problem* autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2011). Dasar pengambilan keputusan dalam uji ini adalah uji Durbin-Watson (uji DW) adalah nilai d (Durbin Watson) terletak antara d_U dan $(4-d_U)$, yaitu :

1. Jika d (durbin watson) lebih kecil dari d_L atau lebih besar dari $(4-d_U)$, maka terdapat autokorelasi.



2. Jika d (durbin watson) terletak di antara d_U dan $(4-d_U)$, maka tidak terjadi autokorelasi.

3. Jika d (durbin watson) terletak di antara d_L dan d_U atau di antara $(4-d_U)$ dan $(4-d_L)$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

3.4.3 Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Persamaan regresi dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$

Keterangan :

Y = Luas pengungkapan sukarela

A = konstanta (tetap)

β_{1-7} = koefisien regresi

X_1 = Ukuran dewan komisaris

X_2 = Komisaris independen

X_3 = Kepemilikan institusional

X_4 = Kepemilikan keluarga

X_5 = Ukuran perusahaan

X_6 = Ukuran KAP



$e = error$

3.4.4 Pengujian Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi yang dilambangkan dengan *Adjusted R²* pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi berada diantara 0 dan 1. Nilai *Adjusted R²* yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

2. Uji F

Uji F bertujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi (sig) F yang dibandingkan dengan batas signifikansi yang ditetapkan yaitu sebesar 5% atau 0,05 jika nilai probabilitas signifikansi < 0,05 maka secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika nilai probabilitas signifikansi > 0,05 maka secara simultan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali 2016)

3. Uji Statistik (*t-test*)

Uji t dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Hasil dari



pengujian ini dilihat dari nilai signifikan t masing-masing variabel pada output

hasil regresi dengan *significant score* 0,05 ($\alpha = 5\%$). Diterima atau tidaknya

hipotesis apabila memenuhi kriteria :

1. Hipotesis ditolak jika nilai signifikansi $> 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
2. Hipotesis diterima jika nilai signifikansi $\leq 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur sub sektor industri barang konsumsi yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2016 – 2018. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor industri barang konsumsi yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2016 – 2018 yang lulus kriteria sampel yang telah ditentukan oleh peneliti. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *Purposive Sampling*. Hasil seleksi menghasilkan 27 perusahaan sampel dalam periode pengamatan 2016 – 2018. Rincian proses pemilihan sampel dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Perhitungan Sampel Penelitian

No	Kriteria Pemilihan Sampel	Jumlah
1	Perusahaan manufaktur sub sektor industri barang konsumsi yang terdaftar selama 2016 – 2018 di bursa efek indonesia.	53
2	Perusahaan manufaktur subsektor industri barang konsumsi yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk tahun 2016 sampai dengan 2018 secara berturut-turut.	(18)
3	Perusahaan manufaktur subsektor industri barang konsumsi yang listing di Bursa Efek Indonesia dan <i>annual report</i> nya pernah menunjukkan kerugian untuk periode 2016 – 2018 secara berturut – turut.	(8)



4	Perusahaan manufaktur subsektor industri barang konsumsi yang mengalami delisting selama periode penelitian.	(0)
	Jumlah sampel dalam tahun penelitian	27

Sumber : Data Sekunder diolah 2020

Berdasarkan tabel 4.1. menunjukkan bahwa jumlah perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2016 – 2018 terdapat 53 perusahaan. Perusahaan sampel yang tidak menerbitkan *annual report*-nya dan tidak terdaftar berturut turut pada periode 2016 – 2018 secara berturut – turut terdapat 18 perusahaan. Sedangkan perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia dan *annual report*nya pernah menunjukkan kerugian untuk periode 2016 sampai dengan 2018 secara berturut – turut adalah sebanyak 8 perusahaan. Dan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang mengalami delisting selama periode pengamatan tahun 2016 sampai dengan 2018 adalah sebanyak 0 perusahaan, sehingga jumlah sampel sebanyak 27 perusahaan.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis maka didapatkan hasil uji sebagai berikut :

4.1.2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai variabel – variabel penelitian seperti variabel independen yang digunakan adalah mekanisme *corporate governance* dengan proksi ukuran dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan keluarga, ukuran perusahaan dan ukuran KAP . Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah pengungkapan sukarela. Statistik deskriptif untuk variabel – variabel tersebut dapat dilihat dalam tabel 4.2 sebagai berikut.



Tabel 4.2
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std Deviation
DK	81	2	8	4.48	1.43
KI	81	0,20	0,80	0,38	0,16
KINSTITUSIONAL	81	0.23	1.86	0.73	0.22
KKELUARGA	81	0.00	1.63	0.12	0.33
UP	81	11.98	18.39	15.02	1.56
KAP	81	0.00	1.00	0.57	0.50
PENGUNGKAPAN	81	0.09	0.72	0.32	0.12
Valid N	81				

Sumber : Data Sekunder diolah 2020

Berdasarkan tabel 4.2 disajikan statistik deskriptif variabel penelitian meliputi nilai minimum, nilai maksimum, rata – rata (*mean*) dan standar deviasi.

Pada variabel independen dengan proksi Ukuran Dewan Komisaris diperoleh rata – rata variabel sebesar 4,48 dengan standar deviasi sebesar 1,43. Dari hasil uji ini didapatkan nilai tertinggi sebesar 8 dimana sampel tersebut adalah PT. Indofood Tbk. dan nilai terendah sebesar 2 dimana sampel tersebut adalah PT. Siantar Top Tbk.

Untuk variabel independen dengan proksi Komisaris Independen diperoleh rata – rata variabel sebesar 0,38 dengan standar deviasi yang didapatkan adalah sebesar 0,16. Dari hasil uji ini didapat nilai tertinggi sebesar 0,80 dimana sampel tersebut adalah PT. Unilever Tbk. dan nilai terendah sebesar 0,20 dimana sampel tersebut adalah PT. Sekarlaut Tbk.

Untuk variabel independen dengan proksi Kepemilikan Institusional didapatkan rata – rata variabel sebesar 0,73 dengan standar deviasi sebesar 0,22.



Dari hasil ini juga didapat nilai maksimum sebesar 1,86 dimana sampel tersebut adalah PT. Sido Muncul Tbk. dan nilai minimum sebesar 0,23 dimana sampel tersebut adalah PT. Delta Jakarta Tbk.

Pada variabel independen dengan proksi Kepemilikan Keluarga diperoleh nilai rata – rata variabel sebesar 0,12 dan nilai standar deviasi sebesar 0,33. Dari hasil uji ini diperoleh juga nilai tertinggi sebesar 1,63 dimana sampel tersebut adalah PT. Siantar Top Tbk. dan nilai terendah sebesar 0,00 dimana sampel tersebut adalah sebanyak 13 perusahaan yang didalamnya tidak memiliki saham dengan kepemilikan keluarga.

Pada variabel kontrol Ukuran Perusahaan diperoleh nilai rata – rata variabel sebesar 15,02 dan nilai standar deviasi sebesar 1,56. Dari hasil uji ini diperoleh juga nilai tertinggi sebesar 18,39 dimana sampel tersebut adalah PT. Indofood Tbk. dan nilai terendah sebesar 11,98 dimana sampel tersebut adalah PT. Pyridam Farma Tbk.

Pada variabel kontrol Ukuran KAP diperoleh nilai rata – rata variabel sebesar 0,57 dan nilai standar deviasi sebesar 0,5. Dari hasil uji ini diperoleh juga nilai tertinggi sebesar 1,00 dan nilai terendah sebesar 0,00.

Sedangkan untuk variabel dependennya yaitu Pengungkapan Sukarela memiliki nilai rata – rata sebesar 0,32 dengan standar deviasi sebesar 0,12. Dari hasil uji didapat juga nilai tertinggi sebesar 0,72 dimana sampel tersebut adalah PT. Kino Indonesia Tbk. dan nilai terendah sebesar 0,09 dimana sampel tersebut adalah PT. Ultra Jaya Tbk.



4.1.3 Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Model regresi dikatakan baik apabila model regresi tersebut terbebas dari masalah uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Hasil pengujian asumsi klasik untuk persamaan regresi adalah :

1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah data hasil penelitian mempunyai distribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan menggunakan uji *Kolmogrov – Smirnov*. Bila probabilitas hasil uji *Kolmogrof – Smirnov* lebih besar dari 0,05 ($>0,05$) maka data penelitian akan berdistribusi normal dan apabila sebaliknya maka data penelitian tidak berdistribusi normal.

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas Data

		Unstandardized Residual
N		81
Normal Parameters(a,b)	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,11563130
Most Extreme Differences	Absolute	0,136
	Positive	0,136
	Negative	-0,085
Kolmogorov-Smirnov Z		0,744
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,637

Sumber : Data Sekunder Diolah 2020

Berdasarkan hasil pengujian normalitas data pada tabel 4.3 maka diketahui bahwa nilai *Kolmogrov – Smirnov* sebesar 0.744 dengan nilai *Asymp. Sig* sebesar



0.637. Hasil ini menunjukkan bahwa probabilitas $>$ *level of signifikan* ($\alpha=5\%$) sehingga dinyatakan berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model uji regresi yang baik selanjutnya tidak terjadi multikolinearitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dengan cara menganalisis matriks korelasi variabel – variabel independen yang dapat di lihat melalui Variance Inflation Factor (VIF). Nilai VIF yang bisa ditoleransi adalah 10 atau nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 maka model dinyatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4
Hasil Uji Asumsi Multikolinearitas

Variabel Dependen	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
DK	0,381	2,627
KI	0,461	2,171
KINSTITUSIONAL	0,695	1,439
KKELUARGA	0,559	1,789
UP	0,507	1,973
KAP	0,409	2,443

Sumber : Data Sekunder Diolah 2020

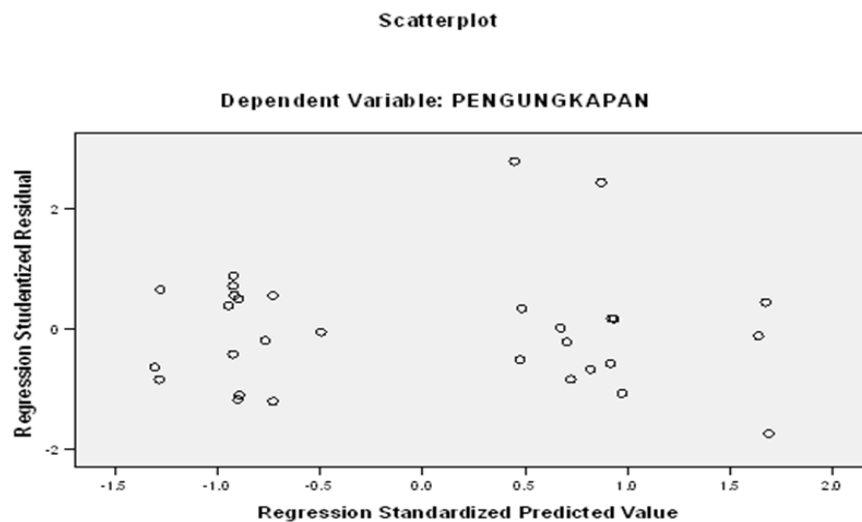
Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *Tolerance* lebih dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95% (tingkat ketelitian). Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga



menunjukkan nilai VIF kurang dari 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel dalam model regresi di penelitian ini.

3. Uji Heterokedastisitas

Dalam uji heterokedastisitas ini menggunakan *scatter plot* yang merupakan sebuah grafik yang diplot poin atau titik yang menunjukkan hubungan antara variabel dependen dengan residunya. Dasar membentuk pola tertentu atau teratur maka mengidentifikasi telah terjadi heterokedastisitas. Sebaliknya apabila titik-titik yang ada menyebar diatas dan dibawah angka 0 sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.



Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas *Scatterplot*

Hasil analisis pada gambar 4.1 menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan dalam penyebarannya tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi adanya heteroskedastisitas pada model yang diuji, sehingga asumsi ini terpenuhi.



4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah uji yang dilakukan untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya ($t-1$). Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel bebas, jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Beberapa uji statistik yang sering dipergunakan adalah uji *Durbin – Watson*. Berikut hasil perhitungan *Durbin – Watson* dengan menggunakan regresi :

Tabel 4.5
Hasil Pengujian Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,672(a)	0,451	0,308	0,129841	2,284

Sumber : Data Sekunder diolah 2020

Dari hasil pengujian didapatkan nilai *Durbin – Watson* sebesar 2,284 sehingga bisa diperoleh perbandingan antara dU , $4 - dU$, dan DW sebagai berikut:

Tabel 4.6
Perbandingan Pengujian Asumsi Non – Autokorelasi

Dl	$4 - dl$	Du	$4 - Du$	Dw	Interpretasi
1,4842	2,5158	1,8008	2,1992	2,284	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber : Data Sekunder diolah 2020

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.6 diketahui bahwa nilai *Durbin – Watson* sebesar 2,284 dengan nilai Du sebesar 1,8008 dan Nilai DL sebesar 1,4842 . Hasil pengujian berada diantara $4-du < dw < 4 - dL$ (2,1992



$<2,284 < 2.5158$) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi yang terbentuk.

4.1.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk selanjutnya dilakukan analisis regresi yang berguna untuk menguji ukuran dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan keluarga, ukuran perusahaan dan ukuran KAP terhadap pengungkapan sukarela.

Dalam pengolahan data dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dilakukan beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara variabel independen dan dependen. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan *Software SPSS IBM V.20 for Windows* didapatkan ringkasan sebagai berikut :

Tabel 4.7
Analisis Regresi Linear Berganda

Model	B	T	Sig.
(Constant)	-0,945	-1,735	0,096
DK	0,332	3,246	0,004
KI	0,385	2,869	0,009
KINSTITUSIONAL	-0,007	-0,526	0,604
KKELUARGA	0,033	2,777	0,011
UP	-0,033	-1,715	0,100
KAP	-0,090	-1,195	0,244

Sumber : Data Sekunder Diolah 2020

Berdasarkan pada tabel 4.7 didapatkan hasil sebagai berikut persamaan regresi yang terbentuk adalah :

$$Y = -0,945 + 0,332DK + 0,385KI - 0,007KINSTITUSIONAL + 0,033KKELUARGA - 0,033UP - 0,090KAP + e$$



Dari persamaan regresi linier berganda di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai $a = -0,945$ menunjukkan bahwa jika ukuran dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan keluarga, ukuran perusahaan dan ukuran KAP sama dengan 0 (nol) maka tingkat pengungkapan sukarela adalah sebesar $-0,945$.
2. Nilai $b_1 = 0,332$ menunjukkan bahwa apabila nilai koefisien ukuran dewan komisaris mengalami penambahan nilai sebesar 1% maka akan meningkatkan pengungkapan sukarela sebesar $0,332$.
3. Nilai $b_2 = 0,385$ menunjukkan bahwa apabila nilai koefisien komisaris independen mengalami penambahan nilai sebesar 1% maka akan meningkatkan pengungkapan sukarela sebesar $0,385$.
4. Nilai $b_3 = -0,007$ menunjukkan bahwa apabila nilai koefisien kepemilikan institusional mengalami penurunan nilai sebesar 1% maka akan mengurangi pengungkapan sukarela sebesar $-0,007$.
5. Nilai $b_4 = 0,033$ menunjukkan bahwa apabila nilai koefisien kepemilikan keluarga mengalami penambahan nilai sebesar 1% maka akan meningkatkan pengungkapan sukarela sebesar $0,033$.
6. Nilai $b_5 = -0,033$ menunjukkan bahwa apabila nilai koefisien ukuran perusahaan mengalami penurunan nilai sebesar 1% maka akan mengurangi pengungkapan sukarela sebesar $-0,033$.



7. Nilai $b_6 = -0,090$ menunjukkan bahwa apabila nilai koefisien ukuran KAP mengalami penurunan nilai sebesar 1% maka akan mengurangi pengungkapan sukarela sebesar $-0,090$.

4.2 Pengujian Hipotesis

1. Uji F

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen dengan proksi ukuran dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan keluarga, ukuran perusahaan dan ukuran KAP mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama – sama terhadap variabel dependen yaitu Pengungkapan sukarela. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji F, dengan cara membandingkan nilai F_{hitung} hasil analisis regresi dengan nilai signifikansi F pada taraf nyata $\alpha = 0.05$.

Tabel 4.8
Hasil Uji Hipotesis F

Model	Sum of Squares	df	F	Sig.
Regression	0,319	6	3,151	0,021
Residual	0,388	23		
Total	0,707	29		

Sumber : Data Sekunder diolah 2020

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.8, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 3,151 dengan nilai signifikan F sebesar $0.021 < \alpha (0.05)$ maka H_1 diterima dan H_0 ditolak, maka variabel ukuran dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan keluarga, ukuran perusahaan dan ukuran



KAP secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan sukarela.

2. Koefisien Determinasi (Uji R²)

Uji koefisien determinasi pada regresi linear sering diartikan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya. Hasil pengujian koefisien determinasi bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.9
Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,672	0,451	0,308	0,129841

Sumber : Data Sekunder diolah 2020

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.10, diperoleh nilai R *Square* (R²) sebesar 0,451 atau 45,1%. artinya bahwa keragaman pengungkapan sukarela dipengaruhi oleh 45,1% variabel ukuran dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan keluarga, ukuran perusahaan dan ukuran KAP. Sedangkan sebesar 54,9% (100 – 45,1) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

3. Uji t

Uji t digunakan untuk menunjukkan apakah masing – masing variabel independen dari *corporate governance* yang diprosikan dengan ukuran dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan



keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu pengungkapan sukarela. Berdasarkan Tabel 4.10 diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 4.10

Uji T

Variabel Bebas	Arah Hipotesis	B	t	Sig.	Kesimpulan
(Constant)		-0,945	-1,735	0,096	
DK	Positif	0,332	3,246	0,004	Diterima
KI	Positif	0,385	2,869	0,009	Diterima
KINSTITUSIONAL	Positif	-0,007	-0,526	0,604	Ditolak
KKELUARGA	Negatif	0,033	2,777	0,011	Ditolak
UP		-0,033	-1,715	0,100	
KAP		-0,090	-1,195	0,244	

Sumber: Data diolah 2020

1) Pengujian Hipotesis Pertama

Variabel independen dengan proksi Ukuran Dewan Komisaris (X_1) diperoleh t_{hitung} sebesar 3,246 dengan signifikansi t sebesar $0,004 < 5\%$ ($0.004 < 0.050$). Maka H_{1a} diterima, dapat disimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris (X_1) berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela (Y) secara signifikan.

2) Pengujian Hipotesis Kedua

Variabel independen dengan proksi Komisaris Independen (X_2) diperoleh t_{hitung} sebesar 2,869 dengan signifikansi t sebesar $0,09 < 5\%$ ($0.009 < 0.050$). Maka H_{1b} diterima, dapat disimpulkan



bahwa variabel komisararis independen (X_2) berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela (Y) secara signifikan.

3) Pengujian Hipotesis Ketiga

Variabel independen dengan proksi Kepemilikan Institusional (X_3) diperoleh t_{hitung} sebesar $-0,526$ dengan signifikansi t sebesar $0,604 > 5\%$ ($0,604 > 0,050$). Maka H_{1c} ditolak, dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan institusional (X_3) terhadap variabel pengungkapan sukarela (Y) tidak berpengaruh secara signifikan.

4) Pengujian Hipotesis Keempat

Variabel independen dengan proksi kepemilikan keluarga (X_4) diperoleh t_{hitung} sebesar $2,777$ dengan signifikansi t sebesar $0,011 < 5\%$ ($0,011 < 0,050$). Maka H_{1d} ditolak, dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan keluarga (X_4) berpengaruh terhadap variabel pengungkapan sukarela (Y) secara signifikan.

5) Pengujian Variabel Kontrol

Variabel kontrol pada penelitian ini adalah ukuran perusahaan dan ukuran KAP. Pada pengujian ukuran perusahaan diperoleh t_{hitung} sebesar $-1,715$ dengan signifikansi t sebesar $0,100 > 5\%$ ($0,100 > 0,050$), sedangkan pada ukuran KAP (X_6) diperoleh t_{hitung} sebesar $-1,195$ dengan signifikansi t sebesar $0,244 > 5\%$ ($0,244 > 0,050$), maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan dan ukuran KAP masing-masing tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pengungkapan sukarela.



4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Pada subbab ini akan menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, terdapat variabel independen yang diteliti yaitu *Corporate Governance* yang diproksikan dengan ukuran dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga. Pembahasan hasil analisis masing – masing variabel independen adalah sebagai berikut.

4.3.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Sukarela

Berdasarkan hasil penelitian, Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Sukarela dalam laporan tahunan perusahaan. Konsisten dengan penelitian yang dilakukan Poulan (2015) yang menunjukkan bahwa semakin besar jumlah dewan komisaris maka akan meningkatkan pengungkapan sukarela pada laporan tahunan perusahaan dengan lebih terbuka dan transparan.

Fungsi dewan komisaris adalah untuk memastikan terlaksananya strategi operasional perusahaan, mengawasi dan mengontrol kinerja manajemen serta memastikan terlaksananya akuntabilitas (Surya, 2006). Sesuai dengan teori agensi, semakin besar jumlah anggota dewan komisaris maka kemampuan dan pengalaman dari dewan komisaris dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja manajemen perusahaan juga semakin meningkat.

Peningkatan jumlah dewan komisaris juga meningkatkan fungsi pengawasan terhadap kinerja perusahaan sehingga manajemen terdorong untuk mengungkapkan kebutuhan akan informasi secara sukarela sesuai keinginan investor untuk menghindari terjadinya asimetri informasi. Konsisten dengan



penelitian yang dilakukan Chen dan Jaggi (2000) yang berpendapat bahwa dewan komisaris dapat berkontribusi lebih dalam mengurangi terjadinya konflik antara agen prinsipal, sehingga jumlah dewan komisaris yang besar dapat mengurangi kemungkinan adanya terjadi asimetri informasi.

4.3.2 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Sukarela

Berdasarkan hasil penelitian, Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Sukarela dalam laporan tahunan perusahaan. Bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Rafifah dan Ratmono (2015) komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela akan tetapi sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Poulan (2015). Semakin tinggi kemampuan komisaris independen dalam melakukan pengawasan pelaksanaan prinsip *good corporate governance* maka akan mempengaruhi manajemen dalam meningkatkan transparansi pengungkapan sukarela lebih efektif (Gantowati, 2014).

Dalam menghindari terjadinya konflik kepentingan, komisaris independen dalam perusahaan memiliki peran penting (Darmadi, 2013). Sesuai dengan teori agensi, agar tetap menjaga independensi dalam komposisi dewan komisaris penekanan untuk lebih banyak pihak independen dalam komposisi dewan komisaris diperlukan. Independensi dan sifat objektif yang dimiliki oleh komisaris independen dalam menjalankan fungsinya, dapat mengurangi terjadinya perilaku oportunistik oleh manajemen internal perusahaan dan mendorong manajemen untuk bertindak dalam mengungkapan informasi bersifat sukarela sesuai dengan harapan investor.



Pengungkapan informasi secara sukarela dalam laporan tahunan perusahaan dapat mengurangi terjadinya konflik kepentingan antara agen dan prinsipal (Abeywardana, 2016). Pada penelitian yang dilakukan oleh O'Sullivan (2007) menyebutkan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh dalam fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja manajemen perusahaan untuk meningkatkan luas pengungkapan informasi yang bersifat sukarela. Hal tersebut sesuai dengan peran komisaris independen yaitu mengawasi jalannya strategi perusahaan dan kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan, menjamin transparansi laporan tahunan serta mengkaji kembali laporan tahunan yang telah diterbitkan oleh perusahaan (Surya, 2006).

4.3.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Sukarela

Berdasarkan hasil penelitian, Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Sukarela dalam laporan tahunan perusahaan. Oleh karena itu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela tidak dapat diterima.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Poulan (2015) dan Ismiyati (2017), yang mengatakan bahwa pengungkapan sukarela bukan merupakan hal yang menarik untuk diungkapkan bagi pihak institusional. Pihak institusi sebagai pemegang saham mayoritas menganggap bahwa informasi yang wajib dilaporkan hanyalah laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Pada dasarnya, pihak institusi tidak secara penuh melakukan pengawasan terhadap perusahaan, sehingga dalam mengelola perusahaan manajemen memiliki keleluasaan dalam mengambil keputusan. Nuryaman (2009) menjelaskan bahwa kepemilikan oleh pihak institusional dapat secara langsung mengakses informasi pada laporan tahunan perusahaan, selain itu pihak institusi hanya menggunakan informasi dari hasil akhir yang diungkap dan dilaporkan pada laporan keuangan sehingga pihak institusional tidak terlalu memperhatikan luas informasi yang diungkapkan secara sukarela oleh perusahaan. Oleh karena itu, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.

4.3.4 Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Pengungkapan Sukarela

Berdasarkan hasil penelitian, Kepemilikan Keluarga berpengaruh secara positif terhadap Pengungkapan Sukarela sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela ditolak. Penelitian yang dilakukan Haniffa dan Cooke (2002) menyebutkan proporsi kepemilikan perusahaan oleh pihak keluarga dapat mempengaruhi dalam praktik pengungkapan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Shleifer dan Vishny (1997) menjelaskan bahwa pengelolaan perusahaan dibawah kepemilikan konsentrasi yang tinggi seperti kepemilikan keluarga, tidak hanya menimbulkan konflik antara manajemen perusahaan dan pemegang saham tetapi juga pemegang saham mayoritas dan minoritas.

Konsentrasi kepemilikan keluarga yang tinggi dapat meningkatkan hubungan antara pihak keluarga dengan manajemen perusahaan sehingga



menyebabkan terjadinya masalah asimetri informasi antara pihak internal perusahaan dengan investor luar. Hal tersebut dikarenakan pihak keluarga dapat mengakses secara langsung informasi keuangan maupun non keuangan sehingga mereka cenderung kurang membutuhkan pengungkapan tambahan (Zaini, 2018).

Kondisi tersebut mengakibatkan kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan sehingga pemegang saham minoritas tidak memiliki informasi tentang kondisi perusahaan sebenarnya (Surya, 2006).

Oleh karena itu, semakin banyak informasi tambahan yang diungkapkan oleh perusahaan maka dapat membantu untuk menarik minat investor luar menanamkan modalnya pada perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan keluarga yang tinggi. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akhtaruddin (2009) yang menunjukkan kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela sehingga hipotesis ditolak.

4.3.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Sukarela

Berdasarkan hasil penelitian, ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fuadi (2017), yang menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki total aset besar belum tentu memberikan pengungkapan yang lebih luas dibanding perusahaan dengan total aset kecil.

Perusahaan kecil juga mempunyai kepentingan yang sama dengan perusahaan besar yaitu sama-sama keinginan untuk memperoleh tambahan dana dari para investor, sehingga perusahaan kecil memungkinkan untuk memberikan



pengungkapan informasi tambahan untuk bersaing dengan perusahaan besar dalam menarik minat investor.

4.3.6 Pengaruh Ukuran KAP terhadap Pengungkapan Sukarela

Berdasarkan hasil penelitian, ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriani (2013) yang menyatakan bahwa hal tersebut dimungkinkan karena kurangnya perhatian dari pihak eksternal pengguna informasi laporan tahunan mengenai perbedaan hasil jasa yang diberikan pihak audit eksternal yang bergabung dengan Kantor Akuntan Publik *Big Four* maupun *non-Big Four*, sehingga reputasi KAP dipandang tidak mempengaruhi luasnya kelengkapan pengungkapan sukarela.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme *Corporate Governance* yang diprosikan melalui Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Keluarga terhadap luas Pengungkapan Sukarela yang disajikan dalam Laporan Tahunan perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2016 - 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen dan Kepemilikan Keluarga menunjukkan adanya pengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan sukarela pada laporan tahunan perusahaan. Sesuai dengan teori sinyal yang menjelaskan bahwa pihak manajemen internal perusahaan memiliki informasi lebih banyak mengenai kinerja perusahaan sehingga untuk menghindari terjadinya asimetri informasi, perusahaan harus memberikan sinyal yang baik kepada pihak investor. Sinyal tersebut dapat berupa tambahan informasi mengenai prospek perusahaan pada pengungkapan sukarela yang disajikan dalam laporan tahunan perusahaan. Sinyal yang diberikan oleh perusahaan juga dapat mengurangi terjadinya konflik agensi antara agen sebagai pengelola perusahaan dan prinsipal yaitu para pemegang saham, karena dengan adanya *Corporate Governance* dapat



membantu untuk mengawasi jalannya kegiatan operasional perusahaan, sehingga dapat memberikan jaminan rasa aman terhadap para pemegang saham untuk melakukan investasi terhadap perusahaan melalui pengungkapan pada laporan tahunan perusahaan.

2. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela oleh perusahaan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pihak institusional hanya mengharapkan pengungkapan informasi secara transparan pada informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sehingga informasi tambahan secara sukarela pada laporan tahunan tidak menjadi perhatian oleh pihak institusional.

5.2 Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada penggunaan indeks pengungkapan sukarela yang terbatas pada ada atau tidaknya item yang diungkapkan hanya menurut daftar *checklist* acuan yang digunakan. Hal tersebut memungkinkan kurang mewakili seluruh informasi tambahan yang diungkap oleh perusahaan mengenai prospek perusahaan sebenarnya. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan lebih dari dua acuan daftar indeks pengungkapan sukarela.



DAFTAR PUSTAKA

- _____. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- _____. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Abeywardana, N. L. E., & Panditharathna, K. M. (2016). The Extent and Determinants of Voluntary Disclosures in Annual Reports : Evidence from Banking and Finance Companies in Sri Lanka. *Accounting and Finance Research*. 5(4), 147–162.
- Achmad, T. (2007). Corporate Governance of Family Firms and Voluntary Disclosure : The Case of Indonesian Manufacturing Firms. *Thesis*.
- Achmad, T. (2012). Dewan Komisaris Dan Transparansi : Teori agensi Atau Teori Stewardship ?. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*. 16(1), 1–12.
- Addiyah, A. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(4), 1–15.
- Agoes, S. 2011. *Etika Bisnis dan Profesi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Akhtaruddin, M., & Haron, H. (2010). Board Ownership , Audit Committees Effectiveness and Corporate Voluntary Disclosures. *Asian Review of Accounting*. 18(1), 68–82.
- Al-Janadi, Y. Rahman, R.A. and Omar, N.H. (2013). Corporate Governance Mechanism and Voluntary Disclosures in Saudi Arabia. *Research Journal and Accounting* 4(4).
- Al-shammari, B. (2013). An Investigation of Voluntary Disclosure by Kuwaiti Shariah Compliant Companies. *Journal of Economic and Administrative Sciences*. 29(1), 21–41.
- Allegrini, M., & Greco, G. (2011). Corporate Boards, Audit Committees and Voluntary Disclosure: Evidence from Italian Listed Companies. *Journal Management Governance*, 17, 187–216.
- Anderson, R. C., & D. M. Reeb. (2005). Founding-family ownership and firm performance: Evidence from the S&P 500. *Journal of Finance*, 58 (3), 1301–1328.
- Angganil, P. A. R., Suartana, I. W., dan Putri, A. D. (2016). Pengaruh Reputasi Auditor dan Jenis Kepemilikan Perusahaan pada Voluntary Disclosure Laporan Tahunan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 6, 1543–1568
- Arifin, Z. (2007). *Teori Keuangan dan Pasar Modal*. Yogyakarta: ISBN



Awan, A. W. & Jamali, J. A. (2015). Impact of Corporate Governance on Financial Performance: Karachi Stock Exchange. *Pakistan. Business and Economic Research*, 6(2), 401–411.

Bungin, Burhan. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Prenadamedia.

Chau, G. & Gray, S.J. (2002) Ownership Structure and Corporate Voluntary Disclosure in Hongkong and Singapore. *The International Journal of Accounting*, 37, 247–265.

Chau, G. and Gray, S.J. (2010) Family Ownership, Board Independence and Voluntary Disclosure: Evidence from Hong Kong. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 19, 93–109.

Chen, C. J. P., & Jaggi, B. (2000). Association between independent nonexecutive directors, family control and financial disclosures in Hong Kong. *Journal of Accounting and Public Policy*, 19(4–5), 285–310.

Damayanti, D. L., & Priyadi, M. P. 2016. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Pada Luas Pengungkapan Sukarela Dan Implikasinya Terhadap Asimetri Informasi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(2), 1–17.

Daniri, M. A. (2005). *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Ray Indonesia

Darmadi, S., & Sodikin, A. (2013). Information Disclosure by Family-Controlled Firms The Role of Board Independence and Institutional Ownership. *Asian Review of Accounting*, 21(3), 223–240.

Effendi, MA. (2009). *The Power of Corporate Governance Teori dan Implikasi*.

Jakarta: Salemba Empat.

Gantowati, E., dan Nugraheni, R. L. (2014). The Impact of Financial Distress Status and Corporate Governance Structures on the Level of Voluntary Disclosure Within Annual Reports of Firms. *Journal of Modern Accounting and Auditing*, 10(4), 389–403.

Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Godfrey, J. (2010). *Accounting Theory*. John Wiley & Sons: Australia.

Hadiprajitno, P. B. (2014). Struktur Kepemilikan, Mekanisme Tata Perusahaan dan Biaya agensi di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 9(2), 97-127

Hamdani. 2016. *Good Corporate Governance (Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Haniffa, R. M., & Cooke, T. E. (2002). Culture , Corporate Governance and Disclosure in Malaysian Corporations. *Abac*, 38(3), 317–349.

Hardiningsih, P. (2008). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Voluntary Disclosure Laporan Tahunan Perusahaan. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 15(ISSN), 67–79.

Hendriksen, E.S. (2002). *Teori Akunting*. Jakarta: Erlangga.



- Hidayat, M. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela Pada Laporan Tahunan Sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Dimensi*, 6(1), 151–172
- Immanuel, R. Y., & Muid, D. (2015). Pengaruh Financial Distress dan Struktur Corporate Governance Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Sukarela. *Journal of Accounting*, 4, 1–11.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Juliarto, A., & Sari, R.A. (2016). Interlock Dewan Direksi, Interlock Auditor Eksternal Dan Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan Sukarela. *Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung, 2016*.
- Karajeh, A. I., Ibrahim, M. Y., & Lode, N. A. B. (2017). Impact of Shareholder Structure on Voluntary Disclosure in Malaysian Companies. *Global Business and Management Research: An International Journal*, 9(1), 142–153.
- Kuncoro, M. (2009). *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance
- Nuryaman. (2009). Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sukarela. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 6(1).
- Nugrahani, T. S., & Nugroho, F, Agus. (2010). Pengaruh Komisaris Independen dan Pengungkapan Sukarela terhadap Kinerja Perusahaan. *Karisma*, 4 (2): 132-141.
- O’Sullivan, M., Percy, M. and Stewart, J. 2008. Australian Evidence on Corporate Governance Attributes and their Association with Forward Looking Information in The Annual Report. *Journal Manage Governance*, 12: 5 – 35.
- Poulan, G., & Nugroho, P. I. (2015). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Kondisi Financial Distress Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela Dalam Laporan Tahun Perusahaan. *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 4(1), 39–56.
- Rafifah, U. R., & Ratmono, D. (2015). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Pengungkapan Sukarela Laporan Tahunan. *Journal of Accounting*, 4, 1-13.
- Sehar, N. (2013). Determinants of Voluntary Disclosure in Annual Report: A Case Study of Pakistan. *Management and Administartive Sciences Review*. 2(2). 181-195.
- Sekaran, U. & Bougie, R. 2014. *Research Methods for Business*. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.
- Shleifer, A. & R.W. Vishny. (1997). A Survey of Corporate Governance. *Journal of Finance*. 52 (2), 737-783.
- Shehata, N. F. (2014). Theories and Determinants of Voluntary Disclosure. *Accounting and Finance Research*, 3(1), 18–26.



Silaban, Y. A. P. (2015). Pengaruh Corporate Governnace Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Tahun 2009-2012). *Jom Fekon Universitas Riau*. 2 (1), 1–15.

Soesetio, Y. (2008). Kepemilikan Manajerial dan Institusional, Kebijakan Dividen, Ukuran Perusahaan, Struktur Aktiva, dan Profitabilitas terhadap Kebijakan Hutang. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 12(3), 384–398

Sumarsono, H. (2014). Family Governance and Firm Value : Evidence From Indonesia. *International Journal Economic Research*, 5(6), 8–26.

Surya, I., & Yustiavandana, I. (2006). *Penerapan Good Corporate Governance : Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Villalonga, B., & Amit, R. (2006). How do family ownership, control and management affect firm value?. *Journal of Financial Economics*, 80(2), 385–417.

Yunita, N., (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Voluntary Disclosre dan Biaya Hutang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(1).

Zaini, S.M., Sharma, U., Samkin, G. & Davey, H. (2018). Impact of Ownership Structure on the Level of Voluntary Disclosure: A Study of Listed Family-Controlled Companies in Malaysia. *Accounting Forum*, 1–34



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: DAFTAR ITEM - ITEM PENGUNGKAPAN SUKARELA LAPORAN TAHUNAN

No.	Item - Item Pengungkapan Sukarela
	Informasi Umum Perusahaan (Kategori 1)
1.	Pernyataan tentang tujuan umum perusahaan.
2.	Struktur organisasi lebih dari satu tingkat di bawah direksi
3.	Pernyataan strategi umum perusahaan
4.	Diskusi lingkungan persaingan.
5.	Status penjualan / pendapatan.
	Prospek Bisnis (Kategori 2)
1.	Informasi mengenai proyeksi jumlah penjualan / pendapatan tahun berikutnya.
2.	Informasi mengenai proyeksi jumlah laba tahun berikutnya.
3.	Informasi mengenai proyeksi jumlah aliran kas tahun berikutnya.
4.	Informasi tentang belanja modal yang direncanakan.
5.	Informasi tentang rencana bisnis.
	Penelitian dan Pengembangan (Kategori 3)
1.	Informasi mengenai kebijakan penelitian dan pengembangan perusahaan.
2.	Informasi mengenai kegiatan penelitian dan pengembangan.
3.	Informasi mengenai perkiraan biaya untuk penelitian dan pengembangan.
4.	Informasi mengenai pengembangan produk / jasa baru.
5.	Informasi mengenai jumlah karyawan di bagian penelitian dan pengembangan.
	Informasi Karyawan (Kategori 4)
1.	Informasi mengenai latar belakang pendidikan karyawan.
2.	Informasi karyawan berdasarkan lini departemen.
3.	Informasi karyawan berdasarkan jenis kelamin.
4.	Informasi mengenai kebijakan rekrutmen karyawan.
5.	Informasi mengenai kebijakan perusahaan pada pelatihan karyawan.
6.	Informasi mengenai rencana program pensiun karyawan.
7.	Informasi mengenai <i>reward</i> untuk karyawan.
8.	Informasi mengenai kejadian kecelakaan yang terjadi pada karyawan.
	Peningkatan Produk dan Pelayanan (Kategori 5)
1.	Informasi mengenai jaminan kualitas produk / jasa.
2.	Informasi mengenai tanggapan perusahaan terhadap keluhan pelanggan.
3.	Informasi mengenai sertifikasi produk / jasa.



	Informasi Tata Kelola Perusahaan (Kategori 6)
1.	Informasi mengenai latar belakang komisaris independen.
2.	Informasi mengenai jumlah anggota komite audit.
3.	Informasi mengenai kegiatan komite audit.
4.	Informasi mengenai kemajuan dalam tata kelola perusahaan
	Informasi Pelaporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Kategori 7)
1.	Informasi mengenai <i>sponsorship</i> untuk bidang pendidikan atau ilmiah.
2.	Informasi mengenai <i>sponsorship</i> untuk bidang olahraga.
3.	Informasi mengenai <i>sponsorship</i> untuk bidang seni dan budaya.
4.	Informasi mengenai <i>sponsorship</i> untuk program pemerintah
	Kategori Finansial (Kategori 8)
1.	Laporan mengenai pertumbuhan penjualan.
2.	Laporan mengenai EBITDA.
3.	Laporan mengenai <i>gearing ratio</i> .
4.	Laporan mengenai <i>interest coverage</i> .
5.	Laporan mengenai <i>earning per-share</i> .
6.	Laporan mengenai <i>pay out ratio</i> .
	Manajemen Risiko (Kategori 9)
1.	Informasi mengenai komite manajemen risiko.
2.	Informasi mengenai komite manajemen aset dan liabilitas.
	Informasi Lainnya (Kategori 10)
1.	Grafik indikator kinerja perusahaan.
2.	Kinerja keuangan perusahaan lebih dari 3 tahun.
3.	Budaya perusahaan.
4.	Nama dari lima <i>supplier</i> atau konsumen terbaik

Sumber : Sari dan Juliarto (2016)



Lampiran 2: Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DK	81	,693	2,079	1,44797	,329171
KI	81	2,996	4,382	3,67698	,263454
KINSTITUSIONAL	81	-1,455	6,697	,57418	2,442986
KKELUARGA	81	-7,345	,490	-3,09030	2,676157
UP	81	11,980	18,385	15,02229	1,557360
KAP	81	,000	1,000	,56790	,498454
PENGUNGKAPAN	81	,087	,717	,32475	,120321
Valid N (listwise)	81				

Lampiran 3 : Analisis Statistik Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		81
Normal Parameters(a,b)	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,11563130
Most Extreme Differences	Absolute	,136
	Positive	,136
	Negative	-,085
Kolmogorov-Smirnov Z		,744
Asymp. Sig. (2-tailed)		,637

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Lampiran 4 : Analisis Statistik Multikolinearitas

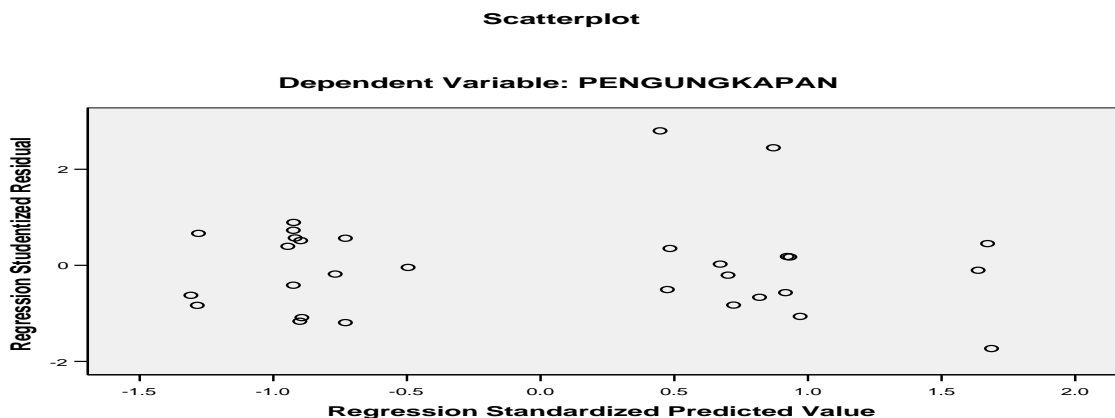
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-,945	,545		-	,096		
	DK	,332	,102	,813	3,246	,004	,381	2,627
	KI	,385	,134	,653	2,869	,009	,461	2,171
	KINSTITUSIONAL	-,007	,014	-,097	-,526	,604	,695	1,439
	KKELUARGA	,033	,012	,574	2,777	,011	,559	1,789
	UP	-,033	,019	-,372	1,715	,100	,507	1,973
	KAP	-,090	,076	-,289	1,195	,244	,409	2,443



a Dependent Variable: PENGUNGKAPAN

Lampiran 5 : Analisis Statistik Heteroskedastisitas



Lampiran 6 : Analisis Statistik Auto-Korelasi

Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,672(a)	,451	,308	,129841	2,284

a Predictors: (Constant), KAP, KKELUARGA, UP, KINSTITUSIONAL, KI, DK

b Dependent Variable: PENGUNGKAPAN



Lampiran 7 : Analisis Statistik Koefisien Regresi

Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,672(a)	,451	,308	,129841	2,284

a Predictors: (Constant), KAP, KKELUARGA, UP, KINSTITUSIONAL, KI, DK

b Dependent Variable: PENGUNGKAPAN

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,319	6	,053	3,151	,021(a)
	Residual	,388	23	,017		
	Total	,707	29			

a Predictors: (Constant), KAP, KKELUARGA, UP, KINSTITUSIONAL, KI, DK

b Dependent Variable: PENGUNGKAPAN

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-,945	,545		-1,735	,096		
	DK	,332	,102	,813	3,246	,004	,381	2,627
	KI	,385	,134	,653	2,869	,009	,461	2,171
	KINSTITUSIONAL	-,007	,014	-,097	-,526	,604	,695	1,439
	KKELUARGA	,033	,012	,574	2,777	,011	,559	1,789
	UP	-,033	,019	-,372	-1,715	,100	,507	1,973
	KAP	-,090	,076	-,289	-1,195	,244	,409	2,443

a Dependent Variable: PENGUNGKAPAN



Lampiran 8 : Tabulasi Data

KODE	Tahun	DK	Komisaris Independen	Kepemilikan Institusional	Kepemilikan Keluarga	UkuranPerusahaan	KAP	Pengungkapan Sukarela
CEKA	2016	3	33,333	0,829	0,000	14,152	1,000	0,478
	2017	3	33,333	0,829	0,000	13,998	1,000	0,391
	2018	3	33,333	0,829	0,000	13,998	1,000	0,478
DLTA	2016	5	40,000	0,233	0,000	14,152	1,000	0,130
	2017	5	40,000	0,233	0,000	14,152	1,000	0,304
	2018	5	40,000	0,233	0,000	13,998	1,000	0,261
ICBP	2016	6	50,000	802,708	0,000	16,272	1,000	0,326
	2017	6	50,000	802,708	0,000	16,272	1,000	0,217
	2018	6	50,000	802,708	0,000	16,272	1,000	0,304
INDF	2016	8	37,500	0,501	0,141	18,225	1,000	0,304
	2017	8	37,500	0,501	0,141	18,292	1,000	0,370
	2018	8	37,500	0,501	0,141	18,385	1,000	0,391
MLBI	2016	6	50,000	0,821	0,000	14,561	1,000	0,326
	2017	6	50,000	0,821	0,000	14,561	1,000	0,196
	2018	6	50,000	0,821	0,000	14,561	1,000	0,348
MYOR	2016	5	40,000	0,591	0,148	16,373	0,000	0,348
	2017	5	40,000	0,591	0,148	16,517	0,000	0,696
	2018	5	40,000	0,591	0,148	16,683	0,000	0,326
ROTI	2016	3	33,333	0,731	0,000	14,880	1,000	0,413
	2017	3	33,333	0,731	0,000	15,342	1,000	0,391
	2018	3	33,333	0,731	0,000	15,297	1,000	0,413
SKBM	2016	3	33,333	0,839	0,000	13,816	0,000	0,522
	2017	3	33,333	0,828	0,000	14,286	0,000	0,326
	2018	3	33,333	0,828	0,000	14,403	0,000	0,348
SKLT	2016	5	20,000	0,368	0,000	13,250	0,000	0,413
	2017	5	20,000	0,368	0,000	13,363	0,000	0,283
	2018	5	20,000	0,368	0,000	13,524	0,000	0,304
STTP	2016	2	50,000	0,568	1,633	14,648	1,000	0,304
	2017	2	50,000	0,568	1,633	14,648	1,000	0,109
	2018	2	50,000	0,568	1,633	14,771	1,000	0,217
ULTJ	2016	3	33,333	1,859	1,007	15,251	0,000	0,261
	2017	3	33,333	0,467	0,253	15,464	0,000	0,087



	2018	3	33,333	0,467	0,253	15,538	0,000	0,326
GGRM	2016	4	0,000	0,755	0,310	17,959	1,000	0,304
	2017	4	0,000	0,755	0,310	18,017	1,000	0,130
	2018	4	0,000	0,755	0,310	18,016	1,000	0,435
	2016	6	33,333	0,925	0,001	17,565	0,000	0,261
HMSP	2017	6	33,333	0,925	0,001	17,579	0,000	0,087
	2018	6	33,333	0,925	0,001	17,657	0,000	0,109
	2016	3	33,333	717,262	0,291	14,152	0,000	0,261
WIIM	2017	3	33,333	670,445	0,291	13,998	0,000	0,109
	2018	3	33,333	670,445	0,291	14,078	0,000	0,283
	2016	7	42,857	0,921	0,000	14,221	1,000	0,304
DVLA	2017	7	42,857	0,921	0,000	14,286	1,000	0,196
	2018	7	42,857	0,921	0,000	14,346	1,000	0,283
	2016	5	40,000	0,900	0,000	15,342	0,000	0,348
KAEF	2017	5	40,000	0,900	0,000	15,624	0,000	0,217
	2018	5	40,000	0,900	0,000	16,240	0,000	0,304
	2016	6	33,333	0,567	0,000	16,537	1,000	0,348
KLBF	2017	6	33,333	0,567	0,000	16,625	1,000	0,283
	2018	6	33,333	0,567	0,000	16,711	1,000	0,283
	2016	3	33,333	0,867	0,000	13,520	1,000	0,457
MERK	2017	3	33,333	0,867	0,000	13,649	1,000	0,348
	2018	3	33,333	0,867	0,000	14,078	1,000	0,500
	2016	4	50,000	0,538	0,231	12,026	1,000	0,543
PYFA	2017	4	50,000	0,538	0,231	11,980	1,000	0,304
	2018	4	50,000	0,538	0,231	12,139	1,000	0,478
	2016	5	40,000	810,000	0,000	14,914	0,000	0,413
SIDO	2017	5	40,000	810,000	0,000	14,979	0,000	0,391
	2018	5	40,000	810,000	0,000	15,009	1,000	0,217
	2016	5	60,000	784,187	0,000	15,703	0,000	0,283
TSPC	2017	5	60,000	789,246	0,000	15,817	0,000	0,130
	2018	5	60,000	0,799	0,000	15,882	0,000	0,239
	2016	3	33,333	0,915	0,000	13,390	0,000	0,326
ADES	2017	3	33,333	0,915	0,000	13,551	0,000	0,283
	2018	3	33,333	0,915	0,000	13,641	0,000	0,326



KINO	2016	4	50,000	0,802	0,108	15,009	1,000	0,304
	2017	4	50,000	0,802	0,108	14,979	1,000	0,413
	2018	4	50,000	0,802	0,108	15,096	1,000	0,717
MRAT	2016	3	33,333	0,713	0,000	13,088	0,000	0,348
	2017	3	33,333	0,713	0,000	13,117	0,000	0,478
	2018	3	33,333	0,713	0,000	13,146	0,000	0,239
TCID	2016	5	40,000	0,722	0,001	14,604	1,000	0,283
	2017	5	40,000	0,722	0,001	14,691	1,000	0,174
	2018	5	40,000	0,722	0,001	14,691	1,000	0,304
UNVR	2016	5	80,000	0,850	0,001	16,631	1,000	0,304
	2017	5	80,000	0,850	0,001	16,755	1,000	0,435
	2018	5	80,000	0,850	0,001	16,786	1,000	0,435
CINT	2016	4	0,000	0,707	0,003	12,897	0,000	0,457
	2017	4	0,000	0,707	0,003	13,074	0,000	0,370
	2018	4	0,000	0,707	0,003	13,105	0,000	0,348